

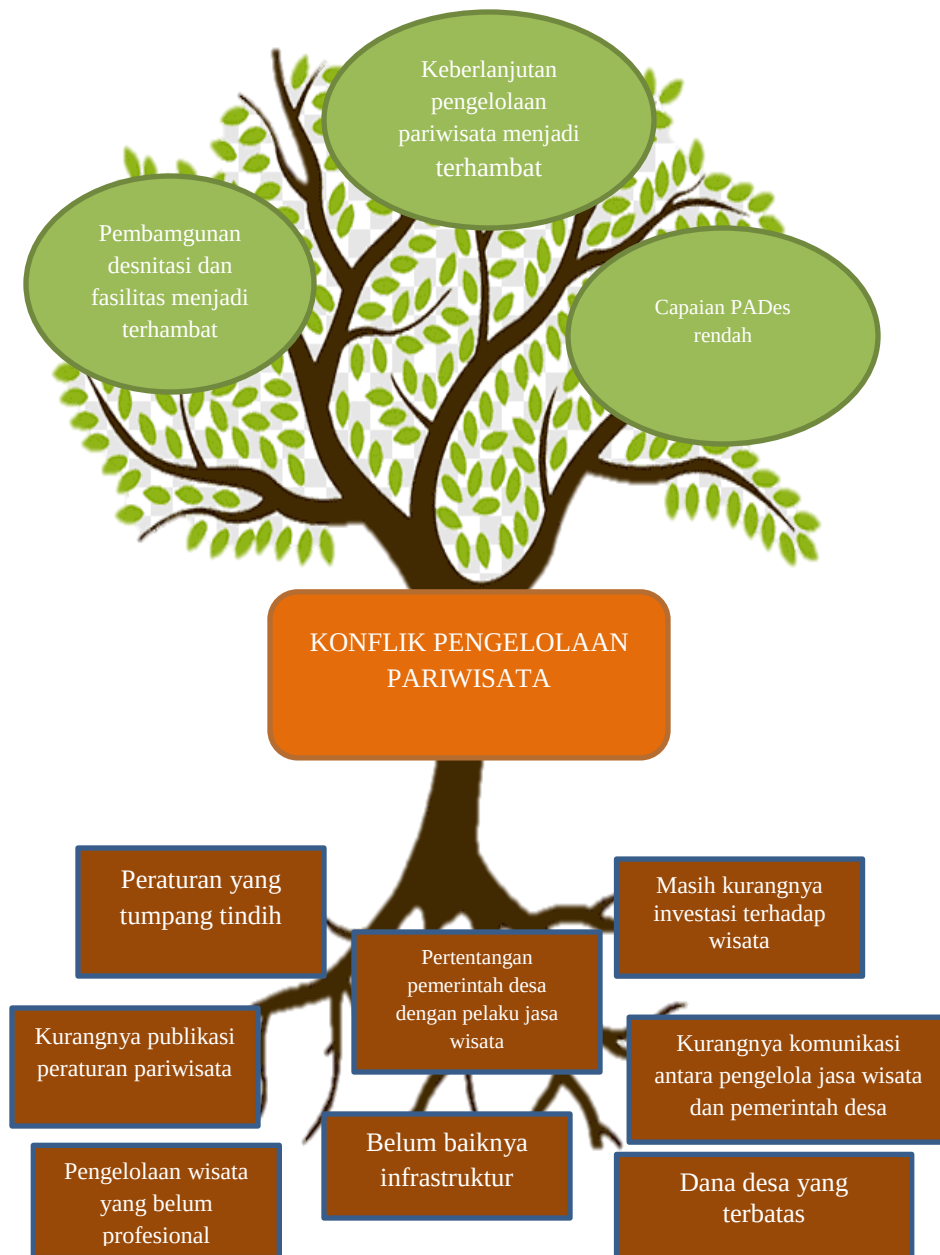
TUGAS
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

OLEH
LARAS RETNO WULANDHARIE (2326061006)

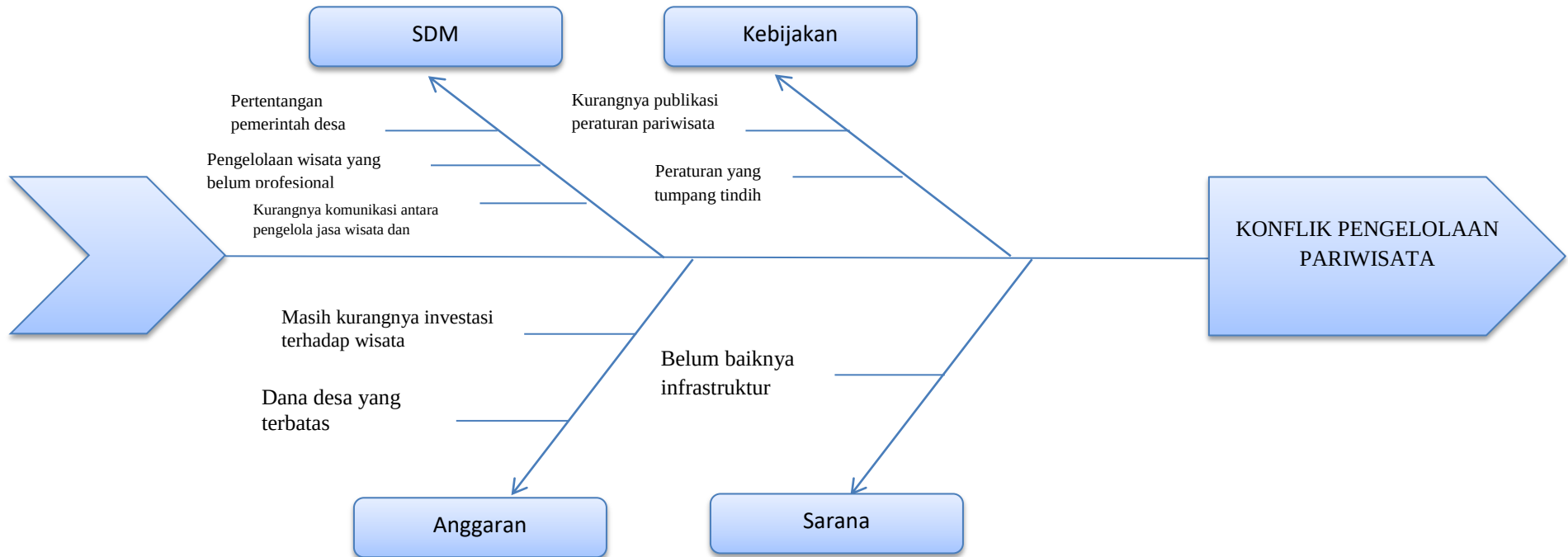


MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

TREE CAUSE



FISHBONE



Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism

ABSTRAK

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Seperti halnya yang terjadi di desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Adanya pengembangan sektor pariwisata dengan obyek wisata Pahawang telah mengubah perekonomian masyarakat desa Pulau Pahawang. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan obyek wisata tersebut muncul berbagai permasalahan yang berujung konflik. Konflik yang terjadi disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana obyek wisata Pahawang dianggap sebagai asset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Pahawang disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan serta masih ada tumpang tindih regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

RINGKASAN MASALAH

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Sektor pariwisata kini telah menjadi kebutuhan global. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri, termasuk industri pariwisata. Saat ini industri pariwisata merupakan bagian dari salah satu sentral penghasil devisa bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi leading sector pembangunan karena dapat menggerakkan perekonomian bangsa. Pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah, dan menjadi salah satu penyumbang devisa Negara. Selain itu, pariwisata juga memberi dampak pada pembangunan dunia, kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pariwisata perlu dijaga keberlangsungannya. Pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang menghormati penduduk setempat dan wisatawan

lain, warisan budaya dan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) pilar yang harus diseimbangkan agar pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat berlangsung dalam jangka panjang yaitu pilar sosial (community), pilar lingkungan (environment) dan pilar ekonomi (economy).

Desa wisata berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dari level akar rumput, dengan mengikutsertakan penduduk lokal pada mata rantai wisata dan pembinaan pendidikan, keterampilan dan pengelolaan lokal. Kearifan lokal sebagai dasar pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata pedesaan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat. Wisata pedesaan dianggap sebagai daya tarik dalam destinasi yang secara signifikan merangsang pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk komunitas lokal. Pengembangan pariwisata daerah pedesaan adalah dampak dari perubahan minat wisatawan ke daerah turis tujuan. Tren yang berkembang dan motivasi perjalanan wisata khusus untuk kembali ke alam untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan minat untuk mempelajari keunikan budaya lokal mendorong pengembangan pariwisata di daerah pedesaan.

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang mempunyai sumber daya yang melimpah pada bidang pariwisata. Di balik keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata pulau pahawang di sisi lain mulai memunculkan konflik dalam pengelolaan pariwisatanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dapat terjadi dalam proses interaksi sosial sehari-hari, baik antara sesama individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok masyarakat dengan pemerintah dan lainnya, semua itu berpotensi terjadinya konflik. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan atau adanya berbagai perbedaan pendapat dalam individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat.

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Pahawang disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana keberadaan Pahawang yang dikelola sebagai obyek wisata dianggap sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Struktur ekonomi yang dimaksud terlihat jelas dengan adanya peningkatan pendapatan yang begitu pesat dihasilkan oleh obyek wisata Pahawang setiap tahunnya. Selain adanya peningkatan dari segi pendapatan. Pengembangan obyek wisata ini,

membuka peluang untuk masyarakat setempat dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja dalam mengelola obyek wisata ini. Selain penyerapan tenaga kerja, pengelolaan obyek wisata Pahawang juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini tercermin dengan adanya penyerapan pedagang di area pengembangan obyek wisata Pahawang.

Konflik ini bermula ketika pemerintah desa pulau pahawang menetapkan Peraturan Desa No 2 tahun 2023 tentang pungutan desa. Namun, penerapan perdes yang mewajibkan wisatawan membayar retribusi Rp 10.000 dikeluhkan pelaku jasa wisata. Hal ini menimbulkan konflik antara pemerintah desa dengan pelaku jasa wisata. Konflik ini terjadi disebabkan oleh Peraturan yang tumpang tindih, kurangnya publikasi peraturan pariwisata, pengelolaan wisata yang belum profesional, pertentangan pemerintah desa dengan pelaku jasa wisata, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi terhadap wisata serta penggunaan dana desa yang terbatas yang mengakibatkan pembangunan destinasi dan fasilitas menjadi terhambat, keberlanjutan pengelolaan pariwisata menjadi terhambat dan capaian PADes yang rendah.

Menurut pemerintah desa pulau pahawang retribusi tersebut diberlakukan agar keberlanjutan pariwisata di Pahawang berjalan dengan baik dengan perbaikan destinasi dan fasilitasnya. Namun menurut pelaku jasa wisata, dalam penerapan peraturan tersebut mereka tidak mendapatkan sosialisasi terkait penerapan perdes tersebut serta pungutan masuk Desa Pulau Pahawang dilakukan di tanah dengan status hak milik perorangan/pribadi, bukan milik pemerintah/desa. Stakeholder yang terlibat dalam konflik ini terdiri dari Lembaga pemerintah, komunitas dan BUMN. Lembaga pemerintah yang terlibat dalam konflik ini adalah Pemerintahan Desa, BUMDes sedangkan komunitas atau masyarakat yang terlibat dalam konflik ini adalah pelaku jasa wisata dan pemilik UMKM di dermaga Ketapang.

Adanya konflik yang terjadi di dalam pengelolaan obyek wisata Pahawang berdampak pada berkurangnya tingkat kerukunan dalam masyarakat, bahkan diantara kelompok masyarakat saling curiga menunjukkan bahwa adanya dampak negative dari konflik tersebut yaitu perpecahan. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Obyek

Wisata Pahawang berdampak pada prasangka-prasangka negatif yang timbul di tengah masyarakat. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya prasangka-prasangka negative ditengah masyarakat yaitu dapat menimbulkan ketidak nyamanan yang dirasakan setiap masyarakat.

Dalam memahami konflik yang terjadi pada komunitas wisata desa Pulau Pahawang dilakukan analisis konflik dengan berbasis community based tourism. Community-Based Tourism dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, mendiversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan menyediakan peluang pendidikan. CBT dipahami untuk dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jenis pariwisata ini akan melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniati, N., Lubis, D., Kinseng A. (2021). Manajemen Konflik dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jurnal Sosiologi Pedesaan (Vol. 9, Issue 03).

Peraturan Desa Pulau Pahawang No. 02 Tahun 2023 Tentang Pungutan Desa.

Putu, N., Mahadewi, E., & Sudana, P. (2017). Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Analisis Pariwisata (Vol. 17, Issue 1).

Widiyanto, D., Purwo Handoyo, J., & Fajarwati (2008). Pengembangan Pariwisata Perdesaan (Suatu Usulan Strategi Bagi Desa Wisata Ketingan). Jurnal Bumi Lestari (Vol. 8, Issue 2).